

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# PERLINDUNGAN ANAK

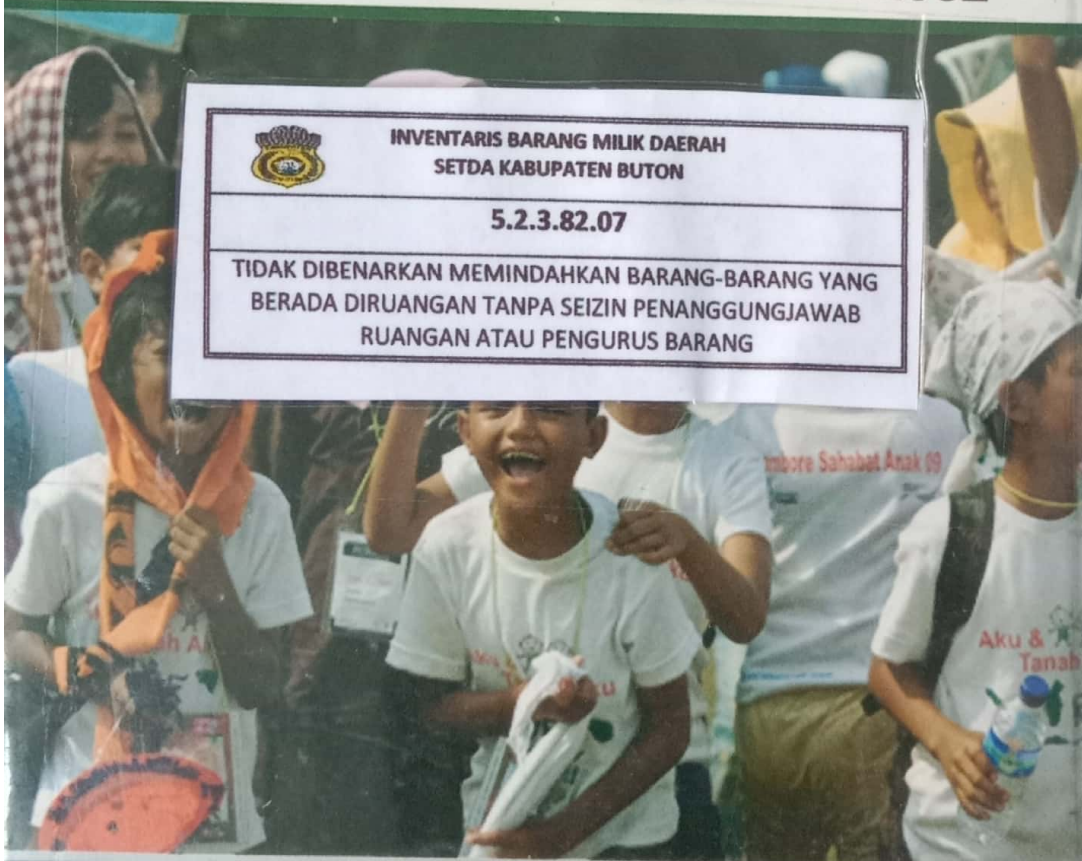
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH  
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG  
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB  
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG



Himpunan Peraturan  
Perundang-Undangan Tentang  
**PERLINDUNGAN ANAK**



135 | 12/11 | 3

**HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Dihimpun Oleh:  
**Tim Redaksi Nuansa Aulia**

Copyright © 2007 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover : Aulia Studio  
Lay Out, Montase : Aulia Studio  
Cetakan I : November 2007  
Cetakan II : Oktober 2010 (Revisi)

Diterbitkan Oleh:  
**CV. NUANSA AULIA**

Jl. Permai 20 No. 18  
Telp. (022) 5405300 Fax. (022) 5416748  
Margahayu Permai, Bandung (40218)  
e-mail: nuansaulia@yahoo.co.id

**ANGGOTA IKAPI**

**KATALOG DALAM TERBITAN**

**Indonesia. [Undang-undang, dsb]**  
Himpunan Peraturan Perundang-undangan  
Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak /  
Dihimpun oleh Tim Nuansa Aulia. Cet. 1. Bandung:  
Nuansa Aulia 2007.  
vi × 234 hlm. ; 10,5 × 20,5 cm  
ISBN 978-979-1272-80-3  
1. Anak, Perlindungan  
I. Tim Redaksi Nuansa Aulia

362.76

# KATA PENGANTAR

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Idealnya, anak merupakan anugerah terbesar dari Tuhan bagi pasangan suami istri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga mereka, sehingga sang anak diperlakukan layaknya manusia seutuhnya sesuai dengan haknya. Namun pada zaman sekarang ini, tepatnya disaat kemiskinan merajalela dan masalah-masalah sosial dan ekonomi menjadi kendala yang berarti dalam kehidupan, anak-anak yang suatu saat menjadi generasi bangsa diperlakukan tidak adil. Anak-anak dibawah umur yang seharusnya berada dalam kehangatan kasih sayang orangtuanya turun ke jalan untuk mencari sesuap nasi di bawah pengawasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan terkadang orangtuanya sendiri. Kini, perlakuan semena-mena terhadap anak-anak semakin meningkat. Hak-hak mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan dan sebagainya seolah-olah diabaikan. Anak-anak bangsa hidup dalam tekanan dan belenggu kebodohan seperti halnya pada zaman penjajahan.

Atas dasar itulah, maka Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan untuk memberi perlindungan terhadap anak-anak yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kami berharap dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak ini, maka perlakuan yang diberikan terhadap tunas-tunas bangsa menjadi lebih berprinsip kemanusiaan, sehingga anak-anak merasa diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dan pada akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi bangsa yang berpotensi.

Bandung, November 2007

**Tim Redaksi Nuansa Aulia**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	1
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	39
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....	58
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	86
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah .....	108
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah .....	116
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak .....	124
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	142

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk.....	150
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak .....	175
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak .....	228